

## ABSTRACT

The involvement of a private investor is considered an alternative effort in developing the potential and natural resources of a region. In this context, private investment in developing the society's land as the village potential is implemented by a partnership between Peasa Village-Owned Enterprise (BUMDes Peasa) and PT BAPM. Certainly, the involvement of BUMDes Peasa in this partnership affects the relationship between the landowners and the company as the main actors. Besides, partnership as a policy involves the local government as the state representative which is often dominant when making its policy. Based on these matters, this research aims to describe the partnership practice between BUMDes Peasa and PT. BAPM by relation perspective between two parties in which each party has its interest.

This research uses a qualitative method by using a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, documentation, and in-depth interview with informants representing government, a private company, and society. By using this approach, the researcher describes relations among actors as the base of achieving the goal suitable with the agreement among actors. The partnership between BUMDes Peasa and PT. BAPM is located in Tole Village, Towuti District, East Luwu Regency. Data Analysis and Information collected are then tailored by using a partnership concept and relation concept among actors..

The result of the research shows that the partnership between PT BAPM and BUMDes Peasa as the representative of the private sector involves many actors. Political motives and interests called investment effectiveness are confronting economic motives and interests related to the empowerment of BUMDes Peasa and Co-Production. Initiation and establishment of the partnership between BUMDes Peasa and PT. BAPM is a top-down policy that shows the dominance of the Regional Government. The implementation of partnerships begins with the formation of cooperative relations among actors, which is declared with the synergy between actors in activating partnerships. Next, BUMDes Peasa as a forum for landowners has not been maximal in fighting for the rights and interests of the society because of differences in perceptions among landowners and BUMDes Peasa regarding agreements with PT. BAPM. On the other hand, the intervention of community leaders (landowners) on company activities also influences the formality of the relationship between BUMDes Peasa and PT. BAPM. Consequently, the society, particularly landowners having productive land, is disadvantaged and even marginalized, so that it is the potential to trigger conflict between the society and the company. Partnership contributions obtained by PT. BAPM is business risk-sharing. BUMDes Peasa gains benefits in the form of a source of income. The society gets social benefits in the form of employment and agricultural infrastructure for the regional government. However, the main benefits of the partnership in the form of profit-sharing have not yet been obtained by various parties, especially landowners.

**Keywords:** *partnership of Village-Owned Enterprise, cooperative relation, local government domination, intervention of community leaders.*

## INTISARI

Keterlibatan swasta melalui investasi dimaknai sebagai upaya alternatif dalam pembangunan dengan mengelola potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah. Pada konteks ini, Investasi swasta dalam mengelola lahan milik masyarakat sebagai potensi desa, dibingkai ke dalam bentuk kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan PT. Bumi Agro Pertiwi Mandiri (BAPM). Pelibatan BUM Desa dalam kemitraan ini, tentu mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan pemilik lahan sebagai aktor utama. Disisi lain, kemitraan sebagai kebijakan tentu melibatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor negara yang tidak jarang mendominasi lewat kebijakannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas praktik kemitraan antara BUM Desa Peasa dan PT. BAPM melalui perspektif relasi antar aktor yang terlibat, dimana setiap aktor memiliki motif dan kepentingan yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan yang merepresentasikan aktor negara, swasta, dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mendeskripsikan relasi aktor sebagai landasan pencapaian tujuan sesuai kesepakatan aktor. Kemitraan BUM Desa Peasa dan PT. BAPM berlokasi di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Analisis data dan informasi yang telah dihimpun kemudian dirangkai dengan menggunakan konsep kemitraan, dan konsep relasi aktor/pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kemitraan antara BUM Desa Peasa dan PT. BAPM—sebagai manifestasi investasi swasta—melibatkan berbagai aktor. Motif dan kepentingan politis berupa efektivitas investasi bertemu dengan motif dan kepentingan ekonomi terkait dengan pemberdayaan BUM Desa dan Co-Produksi. Inisiasi dan penetapan kemitraan BUM Desa dan PT. BAPM sebagai kebijakan yang bersifat *top-down* menunjukkan adanya dominasi Pemerintah Daerah. Implementasi kemitraan, diawali dengan terbentuknya relasi kooperatif antar aktor yang ditandai dengan sinergitas antar aktor dalam mengaktivasi kemitraan. Berikutnya, BUM Desa sebagai wadah pemilik lahan belum maksimal dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat karena perbedaan persepsi dikalangan pemilik lahan dan BUM Desa mengenai kesepakatan dengan perusahaan. Di sisi lain, adanya intervensi dari tokoh masyarakat (pemilik lahan) terhadap aktivitas perusahaan turut mempengaruhi formalitas relasi antara BUM Desa dan PT. BAPM. Implikasinya, masyarakat khususnya pemilik lahan produktif dirugikan bahkan termaginalkan sehingga berpotensi melahirkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Kontribusi kemitraan berupa manfaat diperoleh PT. BAPM berupa *sharing* risiko usaha. BUM Desa memperoleh manfaat berupa sumber pendapatan. Masyarakat memperoleh manfaat sosial berupa lapangan kerja serta infrastruktur pertanian bagi Pemerintah Daerah, namun demikian manfaat utama kemitraan berupa hasil justru belum diperoleh berbagai pihak terutama pemilik lahan.

Kata Kunci: Kemitraan BUM Desa, Relasi Kooperatif, Dominasi Pemerintah Daerah, Intervensi Aktor Masyarakat